









































1. gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan Pemerintah; atau
  2. bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh gubernur; atau
  3. bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya;
- d. pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
1. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
  2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
  3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
- e. dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditambah persyaratan:
1. akta pendirian dan perubahannya;
  2. profile badan usaha/yayasan;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  4. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- f. ketentuan sebagaimana huruf e dikecualikan untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan permohonan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi.
- (2) Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
- a. letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan yang dilukiskan dalam peta;
  - b. kondisi kawasan hutan yang dimohon antara lain memuat informasi:
    1. fungsi kawasan hutan;
    2. tutupan vegetasi;
    3. perizinan pemanfaatan, penggunaan dan/atau pengelolaan;
    4. kuota izin pinjam pakai di dalam areal izin pemanfaatan hutan;



- (2) Kelengkapan persyaratan teknis penyediaan citra satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan:
- a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
  - b. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;
  - c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
  - d. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
  - e. fasilitas umum;
  - f. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;
  - g. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
  - h. penampungan sementara korban bencana alam;
  - i. survei atau eksplorasi; dan
  - j. pertambangan yang luasnya dibawah 5 (lima) hektar;

#### **Pasal 18**

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hanya berupa surat permohonan dan rencana kerja penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan:

- a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
- b. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;
- c. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; atau
- d. penampungan sementara korban bencana alam;